

PEMIKIRAN KEBANGSAAN KH. AHMAD SIDDIQ



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Humaniora (S. Hum)

Oleh:

Muhibin

NIM: 06120029

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

PEMIKIRAN KEBANGSAAN KH. AHMAD SIDDIQ

yang ditulis oleh:

Nama : Muhibin
NIM : 06120029
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasah.

Wassalâmu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 12 Februari 2010
Dosen pembimbing,



Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M. Hum
NIP: 19630306 198903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949
Web: <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail: adab@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/441/2010

Skripsi dengan judul : Pemikiran Kebangsaan KH. Achmad Siddiq

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhibin

NIM : 06120029

Telah dimunaqasyahkan pada : 04 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

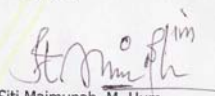
Ketua Sidang


Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M. Hum
NIP. 19630306 198903 1 010

Penguji I


Prof. Dr. M.A. Karim, M.A., M.A.
NIP. 19550501 199803 1 001

Penguji II

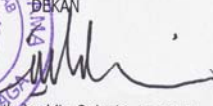

Siti Maimunah, M. Hum
NIP. 19710430 199703 2 002

Yogyakarta, 17 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Adab

DEKAN


Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag.
NIP. 195209211984031001

MOTTO

**“Bila sejarawan mulai membisu, hilanglah kebesaran
masa depan generasi bangsa”.**

Ahmad Mansur Suryanegara

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan
kepada para mahasiswa
yang berjuang menjadi
mujtahid di masa depan. Ingatah bahwa kita yang akan membuat sejarah
bukan kita yang dikendalikan oleh sejarah, dan hendaklah masing-masing dari kita
membuat sejarahnya sendiri.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemikiran kebangsaan KH. Achmad Siddiq, salah satu tokoh besar di lingkungan Nadlatul Ulama (NU) yang pernah menjabat sebagai *Rais 'Aam* PBNU periode 1984-1989. Jika ditelusuri lebih dalam, pemikiran-pemikiran KH. Achmad Siddiq meliputi dua cabang pemikiran, yakni pemikiran mengenai masalah kebangsaan dan pemikiran keagamaan. Namun yang menjadi *masterpeace* pemikirannya adalah masalah kebangsaan yang dengan pemikirannya ini KH. Achmad Siddiq dipercaya untuk memimpin NU periode 1984-1989. Berdasarkan pengamatan penulis, pemikiran-pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang kebangsaan ini masih belum banyak diangkat dalam skripsi maupun dalam penulisan buku, sehingga menarik bagi penulis untuk mengangkat pemikirannya dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang nantinya mampu menghasilkan pengkisahan sejarah secara kronologis. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis data primer maupun data sekunder yang ditulis atau nukilan dari pendapat KH. Achmad Siddiq serta data lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Mengacu pada tema penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan politik yang mengacu pada kaidah-kaidah fihiyyah. Adapun analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis sejarah yang menganalisis perkembangan pemikiran KH. Achmad Siddiq ditinjau dari aspek perkembangan sejarah umat Islam waktu itu.

Sementara itu, temuan-temuan yang penulis dapatkan selama penelitian tentang pemikiran KH. Achmad Siddiq adalah: pertama, KH. Achmad Siddiq mampu merumuskan secara jelas hubungan antara Islam dan Pancasila yang saat itu menjadi isu kontroversial dan hampir semua kalangan di negeri ini menolaknya kecuali beberapa tokoh yang salah satu di antaranya adalah KH. Achmad Siddiq. Dalam masalah ini, KH. Achmad Siddiq menjelaskan secara jernih bahwa Islam adalah agama dan Pancasila hanyalah sebuah ideologi. Agama dan Pancasila tidak boleh dicampuradukkan, agama berasal dari wahyu sementara ideologi merupakan hasil pemikiran manusia, dan bagaimanapun juga sebuah ideologi tidak akan pernah mencapai derajat ke tingkat agama. Umat Islam boleh berideologi apa saja asalkan ideologinya itu tidak bertentangan dengan ajaran agamanya. Agama bisa dimasukkan dalam AD/ART pasal aqidah, sementara Pancasila diletakkan pada pasal asas, dan sangat jelas bahwa aqidah mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada asas. Kedua, sebagai komitmen kebangsaannya, KH. Achmad Siddiq mampu membawa NU keluar dari politik praktis (*khittah* 1926). Pernyataannya yang paling jelas adalah "NU tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana", artinya NU kembali sebagai organisasi keagamaan (*jam'iyyah diniyyah*) dan semua warga NU tidak harus menunjukkan aspirasi politiknya pada satu partai, tetapi bebas menentukan pilihan politiknya sesuai dengan hati nuraninya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	<u>ha</u>	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dlad	dl	de dan el
ط	tha	th	te dan ha
ظ	dha	dh	de dan ha
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

هـ	ha	h	ha
لا	lam alif	la	el dan a
ء	hamzah	‘	apostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vocal tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
..... َ	fathah	a	a
..... ِ	kasrah	I	I
..... ُ	dlammah	u	u

b. Vokal rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
..... َ ِ	fathah dan ya	ai	a dan i
..... َ ُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

حسين : husain

حول : haula

3. Maddah (panjang)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
..... َ َ	fathah dan alif	â	a dengan caping di

			atas
كـ-----ي	Kasrah dan ya	î	i dengan caping di atas
و-----و	Dlammah dan wau	û	u dengan caping di atas

4. Ta Marbutah

- a. *Ta Marbutah* yang dipakai di sini dimatikan atau diberi *harkat sukun*, dan literasinya adalah / h/.
- b. Kalau kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang bersandang /al/, maka kedua kata itu dipisah dan *ta marbutah* ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة : Fâthimah

مكة المكرمة : Makah al-Mukarramah

5. Syaddah

Syaddah/tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bersyaddah itu.

Contoh:

ربنا : Rabbanâ

نزل : Nazzala

6. Kata sandang

Kata sandang “ال” dilambangkan dengan “al”, baik yang diikuti dengan huruf *syamsiyah* maupun yang diikuti dengan huruf *qamariyyah*.

Contoh:

الشمس : al-syamsi

الحكمة : al-Hikmah

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Shalawat dan salam terlimpah kepada Baginda Rasulullah saw., manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis yang akhirnya dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Pemikiran Kebangsaan KH. Achmad Siddiq**”. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan arahan dan kritikan yang sifatnya membangun. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Muhaimin dan Ibu Jumi'ati (Ayah dan Ibu tercinta) yang telah mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, selalu memberi semangat, sehingga penulis dapat menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penuh tanggung jawab. Tidak lupa saudara dan keluarga penulis, Abdul Qahar (kakak), dan A. Muttaqin (kakak) yang sedang menyelesaikan studi S2 di UIN Malang.

Secara akademik, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah merelakan waktunya untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, meskipun sedang disibukkan oleh aktivitasnya yang cukup padat.

Ucapan terimakasih disampaikan pula kepada Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag., Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Maharsi, M. Hum., Ketua Jurusan SKI; Siti Maimunah, M. Hum., dosen Pembimbing Akademik, yang tidak bosan-bosan meluangkan waktunya untuk mempertimbangkan judul-judul skripsi yang penulis ajukan; dan seluruh dosen di Jurusan SKI yang telah memberikan pencerahan ilmu pengetahuan kepada penulis di atas lautan ilmu yang tak bertepi.

Penulis ucapkan terimakasih pula kepada KH. Zainal Arifin Thoha (alm) (Pengasuh Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari Yogyakarta), yang telah menerima kedatangan penulis untuk menjadi santrinya dan dengan sabar membimbing penulis untuk menjadi insan yang mandiri dan berilmu. Kepada Bunda Maya (Pengasuh Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari Yogyakarta saat ini), terimakasih atas dukungan dan bimbingannya selama penulis nyantri di Pesantren Hasyim Asy'ari, serta semua rekan-rekan penulis di Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari yang tulisan-tulisannya selalu mewarnai media massa lokal maupun nasional. Semangat rekan-rekan memberi energi bagi penulis untuk terus berpacu dengan waktu hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kepada rekan-rekan jurusan SKI angkatan 2006 penulis ucapkan terimakasih pula atas semua kerjasamanya yang baik selama menempuh lautan ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada rekan-rekan penulis di Korp Dakwah Masyarakat (KODAMA) dan rekan-rekan di Buletin Damar Yayasan KODAMA diucapkan terimakasih pula yang sebesar-besarnya atas semua partisipasi rekan-rekan sekalian yang dengan rela memberi waktu kepada penulis

untuk menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada rekan-rekan di komunitas Jalansunyi, Cak Mufid, Nur, Minan, Yanwar, Khamim, Mbak Ifa, dan Lusi yang sedikit banyak telah memberikan apresiasi dan hiburan kepada penulis di saat kepenatan sedang melanda penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas itulah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Namun demikian, di atas pundak penulislah skripsi ini dipertanggungjawabkan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 12 Februari 2010 M.
27 Safar 1431 H.

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : NU PADA MASA ORDE BARU	
A. Kebijakan Politik Islam Orde Baru	20
B. Kiprah Politik NU	28
C. NU dan Asas Tunggal Pancasila	36

BAB III	:	KIPRAH KH. ACHMAD SIDDIQ DALAM NU	
		A. Biografi KH. Achmad Siddiq	43
		B. Peranannya dalam NU.....	49
		C. Karya-karya KH. Achmad Siddiq	53
BAB IV	:	PEMIKIRAN KEBANGSAAN	
		A. Islam dan Nasionalisme.....	55
		B. Hubungan Agama dan Pancasila.....	60
		C. NU dalam Perspektif Kebangsaan	66
BAB V	:	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	72
		B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA			75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP			78

DAFTAR SINGKATAN

NU	: Nahdlatul Ulama
Golkar	: Golongan Karya
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Masyumi	: Majelis Syura Muslimin Indonesia
Parmusi	: Partai Muslimin Indonesia
Perti	: Persatuan Islam
DI/TII	: Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia
NII	: Negara Islam Indonesia
Munas	: Musyawarah Nasional
KH	: Kiai Haji
AD/ART	: Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
UUD	: Undang-Undang Dasar
SAW	: <i>shallallâhu ‘alaihi wasallam</i>
Orla	: Orde Lama
Orba	: Orde Baru
PSII	: Partai Syari’at Islam Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
MPRS	: Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kopkamtib	: Komando Pasukan Keamanan dan Ketertiban
RI	: Republik Indonesia

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MDIG	: Majelis Dakwah Islamiyah Golkar
GUPPI	: Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam
P4	: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat- Gotong Royong
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
GP Ansor	: Gerakan Pemuda Ansor
Depag	: Departemen Agama
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
KPPS	: Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
DPRDP	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan
NASAKOM	: Nasional, Agama, Komunis
KUA	: Kantor Urusan Agama
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 1980-an, di dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) mengalami guncangan yang cukup hebat. NU mengalami banyak tantangan dan kepentingan yang cukup menyulitkan bagi NU untuk bergerak. Satu sisi pemerintah memberlakukan de-NU-isasi atau pembersihan orang-orang NU dari PPP, sementara di dalam tubuh NU sendiri terjadi konflik kepentingan antara kelompok politisi dan kelompok kiai. Akhirnya organisasi ini pecah menjadi dua kelompok yang masing-masing merasa berkepentingan untuk menyelamatkan NU.

Para politisi NU menghendaki supaya NU tetap sebagai organisasi politik untuk mengimbangi kekuatan Golkar di parlemen, sementara kelompok kiai tidak lagi menghendaki NU terus menerus menjadi organisasi politik yang tidak henti-hentinya berseteru dengan pemerintah. Mereka ingin memperbaiki hubungan NU dengan pemerintah yang selama ini tidak harmonis, akibat ulah para politisi NU di Jakarta yang semakin radikal. Hal itu sebagai jalan satu-satunya untuk menyelamatkan NU ke depan.¹

Para kiai merasa NU tidak lagi menjadi organisasi mereka karena didominasi oleh para politisi yang tidak memiliki latar belakang kiai. Para politisi NU di Jakarta tidak menghargai lagi para kiai, mereka mengambil

¹Andree Feillard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 201-205.

keputusan dalam masalah partai tanpa bermusyawarah dengan para kiai, mengikuti prioritas dan mengejar kepentingan mereka sendiri, di samping itu para politisi NU ini kebanyakan tidak memiliki pesantren, peranan ulama sebagai penentu langkah organisasi ini semakin lama semakin berkurang, dan para politisi di Jakarta tidak lagi mendengarkan nasehat para kiai lagi.² Inilah yang menjadi sumber dimulainya perpecahan di dalam NU.

Kedua kelompok yang bertikai ini masing-masing dipimpin oleh Idham Chalid sebagai kelompok politisi yang berkantor di Jakarta, yang kemudian lebih dikenal dengan kelompok Cipete, dan kelompok kiai yang dipimpin oleh KH. As'ad Syamsul Arifin yang kemudian dikenal sebagai kelompok Situbondo. Kelompok Cipete tidak banyak memperoleh dukungan dari para ulama, mereka hanya memperoleh sedikit dukungan dari cabang-cabang NU di daerah. Sementara kelompok Situbondo tidak hanya didukung oleh para kiai, melainkan juga memperoleh dukungan dari intelektual muda progresif NU, di antara mereka adalah KH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Ali Maksum (*Rais Aam*), KH. Machrus Ali, KH. Achmad Siddiq, dan kalangan muda pembaru NU, di antaranya Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifuddin, Mustofa Bisri, dan rekan-rekannya. Mayoritas kelompok Situbondo ini menghendaki NU keluar dari PPP dan segera merealisasikan *Khittah* 1926 yang pernah digagas oleh KH. Achmad Siddiq.³

²Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 105.

³*Ibid.*, hlm. 110.

Di saat yang bersamaan, pemerintah Orde Baru yang sudah merasa kesal dengan ulah para politisi Islam dan NU khususnya, mengeluarkan satu kebijakan politis yang memaksa kepada seluruh organisasi sosial politik dan keagamaan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi sosial maupun politik. Ini adalah upaya final pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakannya untuk mengekang organisasi Islam yang sering dicurigai sebagai gerakan pejuang syariat Islam, kelanjutan dari gerakan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) atau Negara Islam Indonesia (NII). Salah satu sasaran utamanya adalah NU, karena NU di samping sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia juga karena NU merupakan pihak yang secara vokal dan paling sering mengkritisi pemerintah dan bahkan menentang kebijakan-kebijakannya.⁴

Menghadapi tantangan yang cukup besar ini, kelompok Situbondo yang memang berkeinginan mengambil jalan damai dengan pemerintah berusaha untuk mendekati pemerintah melalui KH. As'ad Syamsul Arifin. Kelompok ini mengambil sikap moderat untuk meredam kemarahan pemerintah kepada NU selama ini, dan dijadikan sebagai titik awal (*starting point*) untuk melakukan rujuk dengan pemerintah. Untuk membuktikannya, maka pada bulan September 1983, KH. As'ad Syamsul Arifin menemui Presiden Soeharto guna meminta izin mengadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama untuk membahas Asas Tunggal Pancasila, dan dalam keterangannya kepada Presiden Soeharto pada waktu itu, KH. As'ad Syamsul

⁴Feillard, *NU vis a vis*, hlm. 213.

Arifin menegaskan kepada Presiden bahwa Munas Alim Ulama dari kelompok Situbondo sudah dipastikan akan menerima Asas Tunggal Pancasila. Namun, NU harus menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan meminta restu Presiden untuk memberi dukungan.⁵

Pembicaraan antara Presiden Soeharto dan KH. As'ad Syamsul Arifin ini merupakan *entri point* yang sangat penting dalam sejarah NU di masa Orde Baru. Ini sekaligus fakta yang diajukan oleh KH. As'ad Syamsul Arifin kepada pihak penguasa bahwa ulama akan menerima Asas Tunggal Pancasila sebagai bukti kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia yang berideologi Pancasila, kesetiaan yang masih diragukan oleh pihak penguasa. Menanggapi pernyataan KH. As'ad Syamsul Arifin ini pemerintah mengakui keabsahan para ulama untuk menyelenggarakan Munas.⁶

Pendekatan yang dilakukan oleh KH. As'ad Syamsul Arifin ini berhasil. Kenyataannya pada pertengahan 1983, pemerintah jelas lebih menyukai kelompok Situbondo daripada kelompok Cipete, yang pada saat itu antara keduanya sedang dalam persaingan terbuka dan keduanya juga bermaksud untuk mengadakan Munas dan kemudian Muktamar. Bagi pemerintah, mendekati organisasi-organisasi besar semacam NU agar mau menerima tuntutan Asas Tunggal Pancasila merupakan prioritas pemerintah yang sangat urgen.⁷

⁵*Ibid.*, hlm. 218.

⁶*Ibid.*, hlm. 219.

⁷Bruinessen, *NU Tradisi*, hlm. 113.

Hal itu terbukti dengan pemberian pernyataan isyarat kepada kelompok politisi NU di Jakarta pimpinan Idham Chalid , bahwa mereka juga diizinkan untuk mengadakan Munas secara terpisah asalkan tidak mengganggu Munas para ulama di Situbondo, bahkan ketika kelompok Cipete mengumpulkan kelompoknya, dan atas nama 22 propinsi menyatakan kesediaan menerima Asas Tunggal Pancasila, pemerintah kurang menanggapinya karena semua perhatian pemerintah sudah tertuju pada Munas Alim Ulama di Situbondo.⁸ Setelah secara jelas pemerintah mendukung Munas Alim Ulama di Situbondo, kelompok Cipete akhirnya melepaskan rencana mereka untuk menyelenggarakan Muktamar ke-27.⁹

Akhirnya, Munas secara sukses dilangsungkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, 18-20 Desember 1983, di pesantren yang dipimpin oleh KH. As'ad Syamsul Arifin. Selain membahas masalah keagamaan yang menjadi agenda rutin, Munas 1983 ini terasa istimewa karena di Munas ini ditentukan masa depan NU *vis a vis* negara. Agenda penting yang dibahas dalam Munas ini adalah, pertama, pemulihan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dengan mengarahkan program NU sesuai dengan situasi pembangunan dan mengatur perangkat organisasi yang mendukung cita-cita NU sesuai dengan *Khittah* 1926 yang pernah digagas oleh KH. Achamd Siddiq. Kedua, pemantapan Pancasila sebagai asas organisasi dan penjabarannya dalam anggaran dasar; yang nantinya disampaikan oleh KH. Achmad Siddiq yang sejak awal sudah ditugaskan untuk mencari rujukan

⁸*Ibid.*, hlm. 219.

⁹*Ibid.*, hlm. 114.

fikihnya, dan ketiga, penetapan batasan-batasan bagi penyaluran aspirasi politik warga NU melalui kekuatan sosial politik yang ada.¹⁰

KH. Achmad Siddiq yang saat itu menjabat sebagai Mustasyar (penasehat) NU, dipercaya untuk merumuskan masalah penerimaan Asas Tunggal Pancasila sekaligus masalah *Khittah* 1926 yang pernah digagasnya sendiri. Sejak awal ia memang telah ditugaskan oleh para kiai besar NU untuk mempelajari apakah keputusan menerima Asas Tunggal Pancasila dapat dibenarkan menurut fiqh dan dari segi mana keputusan itu harus diterima.¹¹ Ia dipercaya oleh para kiai besar karena luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki yang pernah dibuktikannya melalui konsep *Khittah* 1926.

Dalam Munas ini, KH. Achmad Siddiq menyampaikan makalah setebal 34 halaman di hadapan para ulama untuk menjelaskan soal *Khittah* 1926 dan anjuran untuk menerima Asas Tunggal Pancasila yang saat itu menjadi isu nasional dan menarik perhatian dari kalangan Islam. Dalam penjelasannya, KH. Achmad Siddiq mengajak peserta Munas supaya membedakan secara proporsional antara Pancasila dan Islam. Pancasila itu menurutnya adalah suatu ideologi buatan manusia, sedangkan Islam adalah agama. Agama Islam menurutnya merupakan ciptaan Tuhan (*wadl'un ilahiyyun*) dan sumbernya harus dari wahyu, sementara ideologi berasal dari bermacam-macam pengamalan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, silahkan bicarakan dengan akal dan ilmu yang sudah berkembang,

¹⁰Munawwar Fuad Noeh, Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 140.

¹¹Feillard, *NU vis a vis*, hlm. 217.

jangan mencampuradukkan Pancasila dengan agama. Pancasila yang duniawi jangan di-agama-kan dan agama yang berdasarkan pada wahyu jangan di-Pancasila-kan.¹²

Selain itu, KH. Achmad Siddiq meyakinkan kepada peserta Munas bahwa orang Islam boleh berideologi apa saja asalkan tidak bertentangan dengan agama. Agama dapat dibuat sendiri dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam pasal aqidah. Aqidah menurut KH. Achmad Siddiq lebih tinggi derajatnya daripada asas. KH. Achmad Siddiq juga meyakinkan kepada peserta Munas bahwa dirinya telah mendapat jaminan dari Presiden bahwa pemerintah tidak bermaksud membuat Pancasila menjadi sebuah agama baru, pemerintah hanya ingin mewariskan sebuah negara yang kuat dan bersatu bagi generasi muda. Penerimaan Pancasila apa adanya (*an sich*) semestinya tidak menjadi persoalan bagi NU, karena NU sejak awal telah ikut menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) pada tahun 1945 dan dengan demikian berarti NU telah menerima Pancasila, bukan sebagai taktik politik, melainkan karena NU benar-benar percaya terhadap universalitas prinsip-prinsip ideologi ini.¹³

Dengan mengungkapkan argumentasi dasar (agama) dan historisitas umat Islam Indonesia, serta dalam pembahasan yang sempat berjalan alot dan mempertaruhkan kredibilitas dirinya, akhirnya peserta Munas tidak hanya menerima, melainkan juga menyepakati penetapan Asas Tunggal Pancasila

¹²*Ibid.*, hlm. 141.

¹³*Ibid.*, hlm. 221.

bagi asas organisasinya NU. Presentasi makalah KH. Achmad Siddiq ini kemudian menjadi acuan keputusan Munas 1983 yang selanjutnya melahirkan sebuah “Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila dan Islam”. Keputusan Munas ini kemudian dikukuhkan dalam Muktamar ke-27 yang berlangsung tanggal 8-12 Desember 1984 di tempat yang sama dan atas jasanya menjernihkan hubungan antara Islam dan Pancasila, KH. Achmad Siddiq dipercaya untuk mengemban tugas dalam NU sebagai *Rais ‘Am* PBNU bersama KH. Abdurrahman Wahid sebagai ketua Tanfidziah periode 1984-1989.¹⁴

Bagi NU, KH. Achmad Siddiq diakui telah mampu membawa NU mengarungi wawasan kebangsaan yang lebih luas. Secara perlahan ia membawa NU keluar dari jalur politik praktis melalui bukunya yang berjudul *Khittah Nahdliyyah*. Pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh KH. Achmad Siddiq mampu mengubah jalur perjuangan NU dari jalur politik praktis kembali ke jalur sosial keagamaan sebagaimana NU 1926, bahkan tokoh sekaliber Abdurrahman Wahid, menilai KH. Achmad Siddiq sebagai tokoh yang pantas menyandang gelar keulamaan, kenegarawanan, dan kecendekiawanan sekaligus.¹⁵ Tidak hanya itu, tokoh-tokoh di luar NU seperti M. Nastir dan Nurcholis Madjid mengakui kecendekiawanan KH. Achmad Siddiq.

¹⁴Mastuki HS, *Menghidupkan*, hlm. 142-143.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 145.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pokok pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini adalah pemikiran kebangsaan KH. Achmad Siddiq. Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagaimana berikut:

1. Siapa KH. Achmad Siddiq dan perannya di dalam NU?
2. Bagaimanakah pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang kebangsaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Orientasi utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang kongret mengenai pemikiran kebangsaan KH. Achmad Siddiq yang mampu memberi jalan terang kepada NU untuk menerima Asas Tunggal Pancasila dan membawa NU pada *Khittah* 1926. Dengan penulisan yang sistematis dan komprehensif dapat menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terangkum dalam rumusan masalah.

Adapun tujuan tersebut terinci dalam pernyataan sebagai berikut:

1. mendeskripsikan hubungan NU dan pemerintah selama pemerintahan Orde Baru.
2. mendeskripsikan riwayat hidup KH. Achmad Siddiq dan peranannya dalam NU.
3. menganalisis pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang kebangsaan.

Adapun kegunaan penelitian tersebut antara lain:

1. secara teoretis untuk menambah informasi tentang sejarah pemikiran Islam dan melengkapi khasanah studi sejarah kebudayaan Islam.

2. menambah wawasan tentang sejarah pemikiran Islam yang akan terus berkembang sesuai dengan situasi zamannya, terutama dalam khasanah pemikiran Islam di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis dalam meninjau data kepustakaan mengenai pemikiran KH. Achmad Siddiq, baik melalui buku, skripsi, jurnal, koran, makalah, dan lain sebagainya masih belum banyak ditemukan buku-buku yang secara khusus membahas pemikiran kebangsaan KH. Achmad Siddiq.

Dalam meninjau kepustakaan ini, penulis telah memperoleh beberapa buku yang membahas KH. Achmad Siddiq. Di antaranya adalah buku yang berjudul *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq* yang ditulis oleh Munawwar Fuad Noeh dan Mastuki HS, diterbitkan oleh PT. Pustaka Gramedia Utama tahun 2001. Pembahasan di dalam buku ini tidak terfokus mengkaji pemikiran kebangsaan KH. Achmad Siddiq. Bahasan dalam buku ini mencakup pemikiran keagamaan, tasawuf, metode ijthad dan juga sedikit membahas pemikiran kebangsaan. Bedanya yang penulis teliti, yakni skripsi ini menfokuskan diri pada pemikiran-pemikiran kebangsaannya.

Buku yang berjudul *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama* yang ditulis oleh KH. Abdurrahman Wahid, dkk., diterbitkan oleh Pustaka Pelajar 1995. Salah satu tema di dalam buku ini membahas KH. Achmad Siddiq, namun dalam pembahasannya sangat kompleks, di antaranya mengenai masalah

ijtihad, *ahl as-sunah wa al-jama'ah*, sistem bermazhab, juga membahas pemikiran keagamaan dan kenegaraannya, sehingga bisa dipastikan buku ini jauh berbeda dengan penelitian ini yang secara fokus membahas pemikiran kebangsaan KH. Achmad Siddiq.

Buku yang berjudul *Percik Pemikiran Para Kiai* yang ditulis oleh Samsul Munir Amin, diterbitkan oleh penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2009. Salah satu tema dalam buku ini mengutip tulisan KH. Achmad Siddiq tentang *ahl- as-sunah wa al-jama'ah*. Lebih jauh tema tersebut hanya membahas sejarah perjalanan *ahl- as-sunah wa al-jama'ah*, dari generasi sahabat, sesudah sahabat hingga peranan wali sanga dalam mengembangkan aliran ini ke Nusantara. Bedanya dengan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini membahas pemikiran kebangsaannya.

E. Kerangka Teori

Sebuah penulisan akan memiliki validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan jika dilandasi oleh kerangka teori yang jelas. Sebab dalam pengertian yang lebih luas, teori adalah suatu perangkat kaidah yang memandu seorang sejarawan dalam menyusun bahan-bahan (data) yang diperolehnya dari analisis sumber dan juga dalam mengevaluasi penemuannya.¹⁶

Dilihat dari konteksnya, penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bertujuan untuk menghasilkan bentuk dan proses pengkisahan atas

¹⁶Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 32.

peristiwa-peristiwa manusia yang terjadi di masa lampau. Penelitian sejarah tersebut berkenaan dengan sejarah pemikiran tentang nasionalisme yang memiliki hubungan dengan politik, maka dalam penulisannya dipergunakan pula teori-teori nasionalisme dan politik.

Dalam hal ini pemikir Islam Indonesia kontemporer Nurcholish Madjid, mengatakan bahwa nasionalisme dalam arti bagi umat Islam adalah suatu paham yang memperhatikan kepentingan seluruh warga bangsa tanpa kecuali yang merupakan bagian integral dari konsep Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW.¹⁷

Robert N. Bellah, juga menyebutkan bahwa contoh pertama nasionalisme modern ialah sistem masyarakat Madinah masa Nabi Muhammad SAW., dan para khalifah yang menggantikannya. Sistem yang dibangun Nabi itu, yang kemudian diteruskan oleh para khalifah, adalah suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik daripada yang dapat dibayangkan. Komunitas itu disebut “modern” karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan karena adanya kesediaan pemimpin untuk diadakan penilaian berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan pertimbangan kenisbatan (perbandingan) seperti perkawanan, kedaerahan, kesukuan, keturunan, kekerabatan, dan sebagainya.¹⁸

56. ¹⁷Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Universitas Paramadina, 2003), hlm.

¹⁸*Ibid.*

Hasan al-Banna membedakan antara konsep *al-wathaniyah* dan *al-qawmiyah* dalam menjelaskan arti kebangsaan. *Al-Wathaniyah* memiliki kesamaan arti dengan kata patriotisme yang berarti rasa cinta tanah air. Konsep ini merujuk pada ruang tertentu, tempat tinggal, dan tanah tumpah darah. Keterikatan pada identitas, atau dalam teori sosiologi sebagai status yang diperoleh (*ascribed status*). Singkatnya adalah rasa memiliki negeri sendiri. Kata *al-qawmiyah* lebih diartikan sebagai nasionalisme, yakni rasa berbangsa dan bernegara. Rasa memiliki kesatuan masyarakat politik yang dicapai dan diraih melalui perjuangan tertentu. Konsep ini mengacu pada orang atau sekelompok orang. Biasanya disatukan oleh satu ideologi, visi, dan aspirasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹

Dalam dunia politik Sunni juga dikenal dengan politik kooperatif yang sering dianggap sebagai sikap oportunistik. Politik Sunni melarang untuk memberontak kepada kekuasaan, betapapun zalimnya kekuasaan itu, sekalipun mengkritik dan mengecam kekuasaan yang zalim adalah kewajiban, sejalan dengan perintah Allah swt., untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Para teoritikus politik Sunni sangat mendambakan stabilitas dan keamanan, dengan adagium mereka yang sangat terkenal di dunia Sunni, yakni: “Penguasa yang zalim lebih baik daripada tidak ada penguasa sama sekali,” dan “Enam puluh

¹⁹Abdul Hamid al-Ghazali, *Peta Pemikiran Hasan al-Banna: Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2001), hlm. 195.

tahun bersama pemimpin (imam) yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa ada pemimpin”.²⁰

Sementara itu, dalam ilmu fiqih yang sering kali menjadi landasan hukum oleh para ulama tradisional dalam memutuskan persoalan-persoalan politik, sosial budaya, dan ekonomi menggunakan kaidah-kaidah fiqihyah, di antaranya:

1. *Dâr al-mafâsidi al-muqaddamu ‘alâ jalbi al-mashâlih* (menghindari kerusakan harus didahulukan atas melaksanakan kebaikan).
2. *Mâ lâ yudrak kulluhu lâ yudrak kulluhu* (apa yang tidak diperoleh semuanya jangan ditinggalkan semuanya).
3. *Idzâ ta’â radlâ mufsidatâni rû’iya a’dhahumâ dlarâran birtikâbi akhfihimâ* (apabila terjadi pertentangan antara dua kerusakan, maka harus dipertimbangkan bahaya yang lebih besar, dengan menjalankan resiko yang lebih kecil).
4. *Mâ lâ yatimmu al-wajib illâ bihî fahuwa al-wâjib* (kewajiban yang tidak lengkap kecuali dengan syarat tertentu maka syarat itu menjadi wajib)
5. *Al-muhafadhatu ‘alâ al-qadîm al-shâleh wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah* (memelihara yang lama yang lebih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).

²⁰Nurcholish Madjid dkk., *Islam Universal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 210.

6. *al-dlarûratu tabîhu al-mahdhûrat* (dalam keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang).²¹

F. Metode Penelitian

Dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Heuristik, adalah suatu tahapan pengumpulan data baik itu tertulis maupun lisan yang relevan dengan data yang diperlukan untuk kelengkapan data penulisan. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur dengan cara menelaah isinya melalui buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen yang ada. Penulis dalam hal ini sudah melacak perpustakaan-perpustakaan yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan Daerah (Perpusda) pemerintah Yogyakarta, serta melacak buku-buku yang dijadikan sumber dalam penulisan ini di toko-toko buku, di antaranya Shopping, Sosial Agency, dan toko buku Gramedia, serta melacak sumber-sumber rujukan penulisan kepustakaan ini di tempat perpustakaan-perpustakaan pribadi rekan-rekan penulis.

2. Verifikasi, yaitu menguji dan menganalisis data secara kritis. Dalam hal ini, dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber (autentisitas)

²¹M. Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya* (Yogyakarta: Al- Amin Pers, 1996), hlm. 92-93.

yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang keshahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.²²

Dalam hal ini, penulis melakukan verifikasi semua data hasil penelitian yang penulis temukan dari hasil pencarian data di perpustakaan kampus sampai ke toko-toko buku yang ada. Sesuai dengan metode verifikasi kritik intern dan ekstern. Dapat dipastikan semua data yang ada dalam penulis sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Interpretasi, yakni sering juga disebut juga dengan analisis. Dalam hal ini ada dua metode yang digunakan, yakni analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatukan. Keduanya dipandang sebagai metode utama dalam penulisan. Analisis sejarah itu sendiri bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusun fakta itu dalam susunan interpretasi yang menyeluruh.²³ Tahap ini sangat penting karena merupakan upaya untuk mengkronologiskan sebuah peristiwa sejarah, sehingga menghasilkan konstruksi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti, fakta sejarah tidak dapat menjelaskan apapun kepada kita tanpa dibarengi dengan tafsiran manusia.²⁴ Penulis dalam hal ini menganalisis semua data yang ada, sesuai dengan fokus penulisan dalam skripsi ini dan

²²Abdurahman, *Metodologi*, hlm. 68.

²³*Ibid.*, hlm. 73.

²⁴Frederick. Wiliam H. dan Soeri Soeroto (peny) *Pemahaman Sejarah Indonesia* (LP3ES, 1982), hlm. 10.

mengambil kesimpulan-kesimpulan atau interpretasi atas data yang telah tersedia.

4. Historiografi, yakni langkah terakhir dalam penulisan untuk menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain sehingga terbentuklah sebuah rangkaian sejarah. Historiografi ini merupakan pemaparan hasil penulisan yang telah dilakukan berdasarkan sistematika yang telah dibuat penulis. Setiap pembahasan ditempuh melalui deskripsi dan analisis, dengan selalu memperhatikan aspek kronologi dari suatu peristiwa.²⁵ Setelah data penulis kumpulkan dan usai menganalisis data berdasarkan interpretasi atas data-data tersebut, maka kemudian penulis mengejewantahkannya dalam tulisan sesuai dengan fokus pembahasan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat dibaca secara mudah dan dapat dipahami, maka kajian ini perlu disusun secara sistematis sehingga tidak terjadi kerancuan. Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari lima bagian, yaitu (BAB I) merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan prosedur penulisan yang telah penulis lakukan hingga menjadi sebuah skripsi.

²⁵Nugroho Notokusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1964), hlm. 22-29.

BAB II membahas tentang kebijakan politik Islam masa Orde Baru, kiprah politik NU serta NU dan Asas Tunggal Pancasila. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang historis tentang babakan sejarah kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru guna menemukan gagasan-gagasan pemikiran KH. Achmad Siddiq berdasarkan latar belakang sejarahnya.

BAB III membahas riwayat hidup KH. Achmad Siddiq, di antaranya adalah biografi KH. Achmad Siddiq, peranannya di dalam NU dan karya-karyanya. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh tentang siapa sebenarnya KH. Achmad Siddiq dalam hubungannya dengan NU, pengalaman-pengalaman organisasinya, aktivitasnya di dalam NU dan karya-karya yang telah dia tulis.

Sementara pada BAB IV merupakan fokus utama penulisan ini yang berisi pemaparan pemikiran kebangsaan KH. Achmad Siddiq tentang kebangsaan yang mencakup masalah Islam dan nasionalisme, hubungan Islam dan Pancasila, dan NU dalam perspektif kebangsaan. Pembahasan dalam bab ini sebagai kata penyambung dari bab-bab sebelumnya yang membahas riwayat hidup KH. Achmad Siddiq yang dimaksudkan untuk mengetahui pemikiran kebangsaannya.

BAB V adalah Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat yang merupakan jawaban atas masalah yang telah dibahas melalui tahap analisis historis masing-masing bab

yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya saran ini ditujukan kepada pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil obyek penelitian yang sama, sehingga diharapkan pembahasan tentang pemikiran KH. Acmad Siddiq semakin komplek.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang perlu disimpulkan di sini sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, yakni:

1. KH. Achmad Siddiq adalah seorang ulama di Jawa Timur yang memimpin pondok pesantren Ash-Shiddiqiyah di Jember. Ia lahir pada tanggal 24 Januari 1926, berjarak satu minggu sebelum kelahiran NU. Ia pernah menjadi sekretaris pribadi KH. Wahid Hasyim ketika Wahid Hasyim menjabat sebagai menteri agama. KH. Achmad Siddiq memiliki peranan yang cukup besar di dalam NU. Ia memulai karirnya di NU cabang Jember yang terus menanjak hingga menjadi anggota DPR fraksi NU. Di samping itu sumbangan terbesarnya dalam NU yakni mampu mengembalikan NU dari gerakan politik praktis yang saat itu sedang berseteru dengan pemerintah ke *Khittah* 1926 sehingga NU terlahir kembali menjadi *jam'iyah diniyyah* (organisasi keagamaan) yang memfokuskan diri pada pembangunan kemasyarakatan yang lebih luas dan itu artinya mengakhiri konfrontasi NU dengan pemerintah yang berlangsung sejak lama.
2. Di samping sebagai sosok ulama, KH. Achmad Siddiq juga dikenal sebagai sosok pemikir yang cukup mumpuni. Namanya melejit ke pentas nasional karena berhasil memberi jalan terang antara Islam dan Pancasila melalui sebuah pernyataannya dalam Munas Alim Ulama di Situbondo bahwa

Islam adalah agama dan Pancasila adalah Ideologi, sehingga dengan demikian apabila Pancasila diterima sebagai asas organisasi, maka keputusan itu tidaklah melanggar syariat Islam. Sementara itu agama bisa diletakkan dalam AD\ART dalam pasal aqidah dan Pancasila diletakkan dalam pasal asas organisasi. Menurutnya agama memiliki derajat yang lebih tinggi daripada asas. Selanjutnya, *Khittah Nahdliyyah* menurutnya adalah sesuatu yang mesti dilakukan NU sebagai *starting point* untuk kepentingan kebangsaan yang lebih luas, sehingga NU tidak terjebak pada fanatisme kelompok atau mazhab bahkan agama, maka sebagai sebuah gerakan kebangsaan, konsekuensinya adalah NU keluar dari politik praktis dan membebaskan warga NU untuk memberikan aspirasi politik sesuai dengan hati nuraninya. Pernyataannya ini dirumuskannya pada Musyawarah Nasional Alim Ulama 1983 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Jawa Timur. Namun yang perlu diketahui adalah bahwa pemikiran-pemikirannya ini tidak lepas dari babakan sejarah NU dari waktu ke waktu.

B. Saran

Dalam penyusunan skripsi ini disadari oleh penulis bahwa masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan sehingga membutuhkan koreksi dan saran, serta kritirik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Setidaknya penulis telah menyusun skripsi ini dengan usaha yang maksimal dengan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya, masih ada pihak-pihak lain yang meneliti seputar KH. Achmad Siddiq dan

pemikirannya untuk melengkapi apa yang sudah penulis teliti, sehingga obyek penelitian bisa ini lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES, 2009, hlm. 185.
- _____. *Pergolakan di Jantung Tradisi*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Amin, M. Masyhur. *NU & Ijtihad Politik Kenegaraan*. Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996.
- Arifin, Syamsul. "Sejarah Partai Politik Islam Indonesia dari Orde Lama Sampai Orde Reformasi". Dalam Munzdirin Yusuf (ed.). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka, 2006.
- Bruinessen, Martin van. *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Daman, Rozikin. *Membidik NU; Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Fadeli, Soeleiman. *Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliah Uswah*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Feillard, Andree. *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- _____. "Nahdlatul Ulama dan Negara: Fleksibilitas, Legitimasi dan Pembaharuan". Dalam *Gusdur NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Ghazali, Hamid Abdul. *Peta Pemikiran Hasan al-Banna. Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustidaka Utama, 1994.
- Hananto, Yuli. *Bermuka Dua; Kebijakan Soeharto: Kebijakan Soeharto Terhadap Soekarno Beserta Keluarganya*. Yogyakarta: Ombak, 2005.
- Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Karim, M. Abdul. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Liddle, R. William. *Islam, Politik dan Modernisasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

- Madjid, Nurcholish. *Indonesia Kita*. Jakarta: Universitas Paramadina, 2004.
- _____.dkk. *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- _____. *Islam Kemordernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Misrawi, Zuhairi. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Munir Mulkhan, Abdul. *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan dalam Islam*. Yogyakarta: Sypress, 1999.
- Musa, Ali Machsani. *Nasionalisme Kiai, Kontruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Noeh, Munawwar Fuad, Mastuki HS. *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Notosusanto, Nugroho. *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*. Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1964.
- Partanto, Pius A. M Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkolla, 1994.
- Rickleffs, MC. *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*. terj. Satrio Wahono, dkk. Jakarta: Serambi, 2005.
- Siddiq, Achmad. *Khittah Nahdliyyah*. Surabaya: Khalista, 2005.
- Shobran, Sudarno. *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University press, 2003.
- Sucipto, Hery. *Menegakkan Indonesia, Pemikiran dan Kontribusi 50 Tokoh Bangsa Berpengaruh*. Jakarta: Grafindo, 2004.
- Suprpto, M. Bibit. *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009.
- Suryadinata, Leo. *Golkar dan Militer*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
- Ulum, Bahrul. *Bodohnya NU apa NU dibodohi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Wahid, Abdurrahman. "Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia Dewasa Ini". Dalam *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asi Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Wiliam. H, Frederick, Soeri Soeroto (peny). *Pemahaman Sejarah Indonesia*.
Jakarta: LP3ES, 1982.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Muhibin
Tempat/tgl. Lahir : Kamloko (Kendal), 07 Oktober 1985
Nama Ayah : Muhaimin
Nama Ibu : Jumi'ati
Asal Sekolah : MA Nurul Iman Muara Tebo, Jambi
Alamat kos : Minggiran, MJ II 1482-B Yogyakarta
Alamat rumah : Bogorejo, JL. Tebo-Bungo, Kab. Tebo, Jambi
E-Mail : mr_ibin@yahoo.co.id
No. HP : 085 228 644 991

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK. Raudhatul Ath-Fal Mojoagung, Kendal-Jawa Tengah tahun 1991 s/d 1993
- b. MI Miftahul 'Ulum Mojoagung Kendal-Jawa Tengah tahun 1993 s/d 1997
- c. SDN 323/II Bogorejo, Tebo Tengah-Jambi lulus tahun 1999
- d. MTsN Tebing Tinggi Muara Tebo-Jambi tahun 1999 s/d 2002
- e. MA Nurul Iman Muara Tebo-Jambi 2002 s/d 2004
- f. Program Diploma, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) kab. Tebo-Jambi 2006 (tidak selesai)
- g. S1, Fakultas Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga tahun 2006 s/d Sekarang.

2. Pendidikan non formal

- a. Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari
- b. Kursus Komputer Alif Computer tahun 2003

C. Forum Ilmiah/ Diskusi/ Seminar

1. Peserta Seminar International "*Its' Time for Change*" 11 August 2009 at Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Panitia sekolah Jurnalistik LKKY tahun 2008.
3. Pelatihan Jurnalistik Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum, Krapyak Yogyakarta, tahun 2009, sebagai pembicara.
4. Panitia Jurnalistik Buletin Damar Yayasan Kodama Yogyakarta tahun 2009.

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua OSIS Periode 2003-2004 di MA. Nurul Iman Muara Tebo.
2. “Drum Band Group” Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tebo- Jambi (2004-2005)
3. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), Kab. Tebo, Jambi.
4. Pimpinan Umum Bulletin Damar Yayasan Kodama Yogyakarta, (masa bakti 2009-2010).

5. Prestasi/ Penghargaan

1. Juara 1 MTQ-MFQ Tingkat Kab. Tebo di Sungai Bengkal, Jambi tahun 2002
2. Juara 2 MTQ-MFQ Tingkat Kab. Tebo di Tebo Ulu (Sungai Bengkal), Jambi, tahun 2003.
3. Juara 2 lomba Pidato se MA Nurul Iman Muara Tebo tahun 2003.

Yogyakarta, 08 Februari 2010

Muhibin